

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pemerintahan Junta Militer memunculkan berbagai pelanggaran HAM untuk rakyatnya. Rakyat Myanmar tidak mendapatkan rasa aman dan nyaman dari pemerintah yang berkuasa. Kekuasaan Junta Militer yang mencengkeram Myanmar selama kurang lebih 20 tahun tersebut mendapatkan tentangan dan protes dari berbagai pihak, baik dari dalam dan luar negeri.

Dari dalam negeri sendiri, terjadi gelombang protes dalam skala besar yang awalnya merupakan proses perebutan kekuasaan berbagai etnis. Etnis Burma, etnis terbesar di Myanmar, adalah pendatang. Etnis Shan dan Etnis Mon sudah menetap lebih dulu. Etnis Burma mengambil tampuk kekuasaan dan mencegah dominasi etnis minoritas lainnya. Gelombang protes yang paling besar terjadi pada tahun 1988 dan 2007. Junta menumpas aksi masa besar-besaran itu dengan tindakan yang sangat keji, sehingga menimbulkan kemarahan dari berbagai pihak.

Myanmar yang bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 19 April 1948 ini, pernah mendapat peringatan keras dari Dewan Keamanan PBB pada 2007. Amerika Serikat dan berbagai negara yang tergabung dalam Uni Eropa juga memberlakukan berbagai sanksi dan Embargo terhadap Myanmar

Rezim junta dinilai gagal dalam menjalankan tampuk kekuasaan di Myanmar. Junta berusaha membendung arus demokrasi yang kian deras melanda negerinya. Namun dengan adanya berbagai kudeta yang menumbangkan pemerintahan otoriter yang berkuasa, seperti misalnya Portugal, dan rekan-rekan anggota ASEAN, Thailand, Philipina dan Indonesia, rezim kejam itu perlahan membuka diri terhadap system demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilihan umum pada akhir tahun 2010 dan pembebasan tahanan politik.

Bali Democracy Forum yang diadakan setiap tahunnya oleh Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jendral Informasi dan Media, Kementrian Luar Negeri RI, dibawah pimpinan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono bertempat di Nusa Dua, Bali. Acara yang digagas oleh Mantan Menlu RI, Hasan Wirajuda ini terinspirasi oleh Davos Economic Forum yang dinilai berhasil dalam menyelenggarakan pertemuan tahunan tingkat menteri dan tokoh berpengaruh yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama dalam bidang *capacity building* untuk negara-negara demokratis dan negara-negara *aspiring to be more democratic*.

Sasaran BDF adalah untuk menjalin kerjasama regional yang mempromosikan pembangunan politik melalui dialog dan berbagi pengalaman; untuk menginisiasi proses belajar dan berbagi antar negara di Asia sebagai suatu strategi menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di kawasan dan di luar kawasan; untuk membangun institusi yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk penelitian dan pusat pembelajaran; serta wadah para ahli dalam berbagai hal yang berhubungan

selain itu BDF juga secara berkesinambungan akan menyelenggarakan pelatihan/*workshop*, seminar, *roundtable discussion*, dan lain sebagainya, untuk membahas berbagai isu yang berhubungan dengan demokrasi seperti pemilu, sistem multi partai dalam masyarakat yang pluralistis dan toleran. parlemen yang efektif sistem peradilan yang independen, penegakan hukum, perlindungan dan penegakan HAM, good governance, pembentukan pers yang aktif, pemanfaatan ekonomi persaingan terbuka, pembentukan masyarakat sipil yang dinamis serta keterlibatan militer dalam masyarakat yang demokratis dan banyak isu lainnya.

Bali Democracy Forum bertujuan untuk mempromosikan kerjasama regional dalam isu demokrasi dan pembangunan politik di antara negara-negara di kawasan Asia. Forum ini tidak bersifat eksklusif antarnegara demokratis, tetapi lebih merupakan forum inklusif bagi negara-negara di kawasan untuk berbagi pengalaman dan pelatihan terbaik dalam memperkuat demokrasi.

Para delegasi dari berbagai negara yang hadir tak hanya membahas, namun juga saling tukar pendapat dan pengalaman mereka dan perkembangan demokrasi yang dialami di masing - masing negara peserta. Acara ini tidak hanya bersifat eksklusif antarnegara penganut sistem demokrasi, tetapi lebih sebagai sebuah forum inklusif bagi negara-negara di kawasan untuk berbagi pengalaman dan pelatihan terbaik dalam memperkuat demokrasi. Forum ini bertujuan mendorong kerja sama regional dalam isu demokrasi dan pembangunan politik antar negara Asia dengan berbagi pengalaman, dialog, dan kerja sama praktis dalam memperkuat demokrasi

Myanmar turut berpartisipasi dalam event tersebut demokrasi pertama tingkat Asia tersebut. Dalam acara inilah pemerintahan junta mendapatkan lebih banyak informasi mengenai demokrasi. Pada Bali Democracy Forum II tahun 2009, Myanmar mengirimkan seorang pejabat setingkat menteri. Selain itu Myanmar juga berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum III, pada tahun 2010.

Meskipun Pemilu kali ini masih banyak terdapat campur tangan pihak militer, namun hal ini merupakan angin segar bagi arus demokrasi di Myanmar. Pasca Pemilu, ratusan tahanan politik pun dibebaskan. Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa membuka kembali hubungan diplomatic mereka, serta mencabut sebagian sanksi mereka kecuali embargo senjata dengan tetap memperhatikan kemajuan demokrasi